



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan ...

Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja Perangkat Daerah selama periode 2 (dua) tahun (2025 s/d 2026).
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk 2 (dua) tahun.
3. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
4. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

5. Perencanaan ...

5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 - 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2019-2024.
9. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun.
11. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
13. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
14. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan

pengertian ...

penggerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2024.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
20. Daerah adalah Kabupaten Ende.
21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
22. Bupati adalah Bupati Ende.
23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
24. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
26. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Bappeda Kabupaten Ende.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

BAB II PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

(3) Perencanaan

- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Ende disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada Dinas Perikanan baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perikanan adalah :
- Memberikan arahan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Dinas Perikanan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ende;
 - Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu dua tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Dinas Perikanan sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
 - Memberikan pedoman bagi Dinas Perikanan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.
 - Mewujudkan infrastruktur bidang Perikanan yang handal dan berkelanjutan dalam bingkai masyarakat Kabupaten Ende Bangkit Menuju Sejahtera.
 - Memfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horisontal antar unit kerja dengan pelaku yang berbasis Dinas Perikanan.

BAB IV RENSTRA DINAS PERIKANAN

Pasal 5

- (1) Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025-2026 memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Dinas Perikanan yang berpedoman pada RPD Tahun 2025- 2026.

(2) Sistematika

(2) Sistematika Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- BAB IV Tujuan dan Sasaran
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB VIII Penutup

Pasal 6

Isi dan Uraian Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 7

- (1) Penyusunan Renstra Dinas Perikanan melibatkan semua personil aparatur Dinas Perikanan dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas Perikanan selama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kebutuhan-kebutuhan dan kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Perikanan menyampaikan Rancangan Akhir Renstra kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil Verifikasi Kepala Bappeda diajukan ke bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi peraturan Bupati
- (3) Kepala Dinas Perikanan menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Dinas Perikanan kepada semua Pejabat Pengawas, Administrator dan Pelaksana lingkup Dinas Perikanan.

BAB VI.....

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KABUPATEN ENDE

**Bagian Kesatu
Pengendalian**

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Perikanan melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 10

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Administrator lingkup Dinas Perikanan meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Perikanan melalui Bagian Sekretariat, Fungsional Perencana Sub koordinator substansi program, Evaluasi dan pelaporan yang diketahui oleh Sekretaris.

**Bagian Kedua
Evaluasi**

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Perikanan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan ...

- a. Pelaksanaan Kegiatan Program Dinas Perikanan; dan
- b. Hasil pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Ende.

Pasal 12

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Bidang dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Dinas
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing - masing Bidang dalam rangka pencapaian Renstra Dinas Perikanan.

Bagian Ketiga Perubahan

Pasal 13

- (1) Renstra Dinas Perikanan dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Rensra Dinas Perikanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan

Ruang ...

Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 7 Juni

2024



Diundangkan di Ende
pada tanggal 10 Juni 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 19



RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN PERIKANAN KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 - 2026



DINAS PERIKANAN
KABUPATEN ENDE
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas Berkat dan Penyertaan-Nya maka Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kab. Ende Tahun 2025-2026 ini dapat diselesaikan dan disusun dengan baik.

Sehubungan dengan berakhirnya masa Jabatan Kepala Daerah Kabupaten Ende Periode 2019-2024 dan dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende, maka disusun Renstra Transisi Dinas Perikanan Kabupaten Ende yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan membuat rencana strategis sebagai pedoman kerja setiap perangkat kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dan Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPD. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Ende ini berisikan tujuan, sasaran, rencana program, rencana kegiatan dan rencana sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2025 sampai dengan 2026 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Ende dalam melaksanakan tugasnya di bidang kelautan dan perikanan.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penyusunan Renstra ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak sehingga kami dapat terus berbenah dan memberikan kinerja terbaik untuk kemajuan Kabupaten Ende.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2025-2026 ini dapat terlaksana dengan baik dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Semoga Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Ende ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Ende.

Plt. Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Ende,

RISWANTO ISMAIL, S.Pi

PEMBINA TK. I

NIP : 19760507 200604 1 016

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 - 2026

ISI DAN URAIAN RENSTRA DINAS PERIKANAN

A. DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERATURAN BUPATI ENDE	ii
ISI DAN URAIAN RENSTRA DINAS PERIKANAN.....	iii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisam.....	4
II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERIKANAN KAB. ENDE....	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	5
2.2 Profil Sumberdaya Manusia, Sarana dan Prasarana.....	7
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Ende.....	10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....	19
III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN...	21
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pd	21
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	21
IV TUJUAN DAN SASARAN.....	22
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kab. Ende	22
V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	24
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan Kab. Ende	24
VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	27
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 – 2026.....	27
VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	43
VIII PENUTUP.....	46
8.1 Pedoman Transisi	46
8.2 Kaidah Pelaksanaan	46

B. DAFTAR TABEL

TABEL BAB II

2.1.1 Komposisi pegawai menurut jenis kelamin	7
2.1.2 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	7
2.1.3 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang	8
2.1.4 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti DIKLAT Struktural	8
2.1.5 Jumlah Pegawai yang Telah mengikuti DIKLAT Teknis	9
2.2.1 Kondisi Aset Dinas Perikanan TA. 2019 – 2022	9
2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kab. Ende TA. 2019 – 2022.....	16
2.3.2 Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah Dinas Perikanan Kab. Ende TA. 2019 – 2022	18

TABEL BAB IV

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Ende Tahun 2024 – 2026	23
---	----

TABEL BAB V

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Ende.....	25
---	----

TABEL BAB VI

5.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Ende.....	24
---	----

TABEL BAB VI

6.1 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan serta Indikator Kinerja berdasarkan RPJMD Kab. Ende TA. 2019 – 2024	31
--	----

TABEL BAB VII

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	44
---	----

C. DAFTAR GAMBAR

1.1	Mekanisme Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kab. Ende.....	4
2.1	Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kab. Ende	6
2.3.1	Grafik Produksi Perikanan	10
2.3.2	Grafik Angka Konsumsi Ikan	12
2.3.3	Grafik Produksi Garam	13
2.3.4	Grafik Cakupan Bina Kelompok	14

D. DAFTAR LAMPIRAN

Pembentukan Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetapi membutuhkan dokumen rencana pembangunan menengah sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Untuk menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026, serta memerintahkan seluruh kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Ende disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Ende memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Ende.

Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, maka Dinas Perikanan Kabupaten Ende perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah 2 (dua) tahun. Renstra Perangkat Daerah Transisi ini untuk 2 (dua) tahun 2025-2026 yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 dan bersifat indikatif. Fungsi dari Renstra Perangkat Daerah yaitu sebagai pedoman untuk penyelenggaraan dan pengembangan Perangkat Daerah selama 2 (dua) tahun ke depan. Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan beberapa kebijakan Pemerintah Daerah agar dapat menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 2 (dua) tahun ke depan.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Ende menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Ende yang disusun setiap tahun selama kurun waktu Tahun 2025-2026. Selain itu Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Ende menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi

pembangunan pada Dinas Perikanan Kabupaten Ende baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 disusun berlandaskan :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan daerah Otonom Baru (DOB);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Ende adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam kurun waktu tiga tahun sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Ende.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Ende yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan Kelautan dan Perikanan selama kurun waktu tahun 2025-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Ende dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan kurun waktu tahun 2025-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Ende.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Ende dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Ende yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

- Sistematika penulisan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Ende, sebagai berikut :
- BAB I Pendahuluan :
- 1.1 Latar Belakang;
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan;
 - 1.3 Maksud dan Tujuan;
 - 1.4 Sistematika Penyusunan;
- BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
- BAB III Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV Tujuan dan Sasaran
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan
- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan memuat strategi dan kebijakan yang akan dicapai periode 2024-2026.
- BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan
- 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif : memuat Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang direncanakan Dinas Perikanan Kabupaten Ende periode 2024-2026.
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- 7.1 Indikator Kinerja memuat Mengenai Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Ende yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD periode 2024-2026.
- Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN ENDE

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Ende, Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
2. Melaksanakan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
4. Melaksanakan fungsi lain yang terkait Bidang Kelautan dan Perikanan yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Ende terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap terdiri dari :
 1. Kepala Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perikanan terdiri dari :
 1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perikanan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pengembangan Perikanan Budidaya terdiri dari :

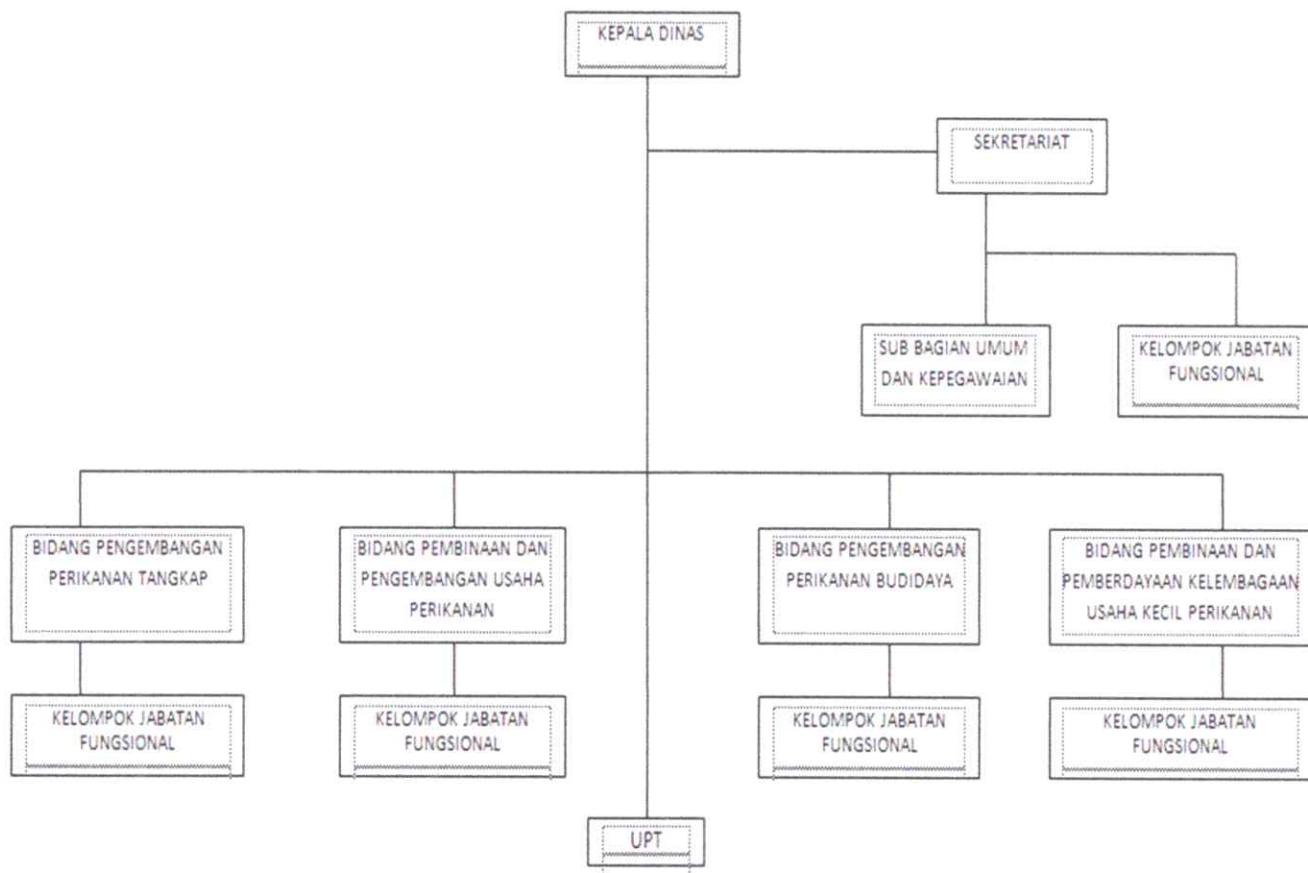
1. Kepala Bidang Pengembangan Perikanan Budidaya;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Kecil Perikanan terdiri dari :
1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Kecil Perikanan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Ende sebagaimana tercantum dibawah ini :

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Ende :

Sesuai Peraturan Bupati Ende Nomor 54 Tahun 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN ENDE



Sumber : Subag Umum dan Kepergawainan DISKAN Ende, Desember 2021

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Ende

2.2 Profil Sumberdaya Manusia dan Sarana Prasarana

2.2.1 Sumber Daya Aparatur (SDM)

1) Susunan Kepegawaian

Keadaan personil pada Dinas Perikanan Kabupaten Ende terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi Jabatan Struktural, Staf Fungsional dan Tenaga Kontrak sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Jumlah seluruh pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Ende sebanyak 32 orang yang dapat dirincikan menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan serta menurut pangkat/golongan ruang.

Berdasarkan jenis kelamin, komposisi pegawai Dinas Perikanan Kab. Ende sebagian besar terdiri dari pegawai laki-laki yaitu sebanyak 18 orang dan jumlah pegawai perempuan yaitu sebanyak 14 orang sedangkan, komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki kualifikasi Sarjana (S1) yaitu sebanyak 26 orang, Diploma sebanyak 2 orang dan SLTA yaitu sebanyak 4 orang.

Dilihat dari rincian berdasarkan pangkat / golongan ruang, sebagian besar pegawai Dinas Perikanan berpangkat / golongan ruang setingkat Pembina, Penata dan Pengatur sedangkan sebagian kecil pegawai adalah tenaga kontrak. Secara lengkap komposisi pegawai menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pangkat/golongan ruang sampai dengan keadaan Bulan Desember 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 2.1.1 : Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	2	3
1	Laki – Laki	18
2	Perempuan	14
	Jumlah	32

Tabel. 2.1.2 : Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	2	3
1	Pasca Sarjana (S2)	-
2	Sarjana (S1)	26
3	Diploma IV (D-IV)	1
4	Diploma III (D-III)	1
5	SLTA	4
	Jumlah	32

Tabel. 2.1.3 : Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah (org)
1	2	3
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	-
2	Pembina TK. I (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	4
4	Penata Tk I (III/d)	10
5	Penata (III/c)	3
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	1
7	Penata Muda (III/a)	3
8	Pengatur Tk. I (II/d)	2
9	Pengatur (II/c)	1
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-
11	Pengatur Muda (II/a)	-
Jumlah		25
1	PPPK-Penata Muda 9	6
2	PPPK-Pengatur 7	1
Jumlah		7
Jumlah Keseluruhan		32

Disamping kualifikasi berdasarkan jenjang pendidikan yang dimiliki pegawai, sampai dengan Bulan Desember 2022, beberapa pegawai Dinas Perikanan Kab. Ende juga telah tercatat pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Struktural seperti tersaji pada Tabel berikut :

Tabel. 2.1.4 : Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No	Jenis Diklat	Jumlah (org)
1	2	3
1	Adum / Adumla/PIM IV	7
2	Spama / Diklatpim III	3
3	Spamen / Diklatpim II	1
	Jumlah	11

Tabel. 2.1.5 : Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis

No	Jenis Diklat	Tahun / Org					Jumlah
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DIKLAT PPNS Perikanan		1				1
2	DIKLAT Fungsional Perencanaan TK. Muda	-	-	-	-	-	-
3	DIKLAT PPL Perikanan TK. Dasar / Pemula	1	-	-	-	-	1
4	Magang Teknik BD. Air Tawar	-	-	-	-	1	
5	Magang Teknik Konstruksi Kapal Ikan FBR	-	1	-	-	1	2
6	Magang Teknik Pemeriksaan / Pengujian Mutu hasil Perikanan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1	1	-	-	2	4

2.2.2 Sumber Daya Aset

Untuk mendukung pelaksanaan dan tugas pokok Dinas Perikanan Kabupaten Ende, maka dalam jangka waktu Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 telah memiliki aset-aset sebagai berikut :

- a) Tanah Seluas 11.118 M² Tanah Perkantoran PPI Paupanda yang merupakan milik propinsi Nusa Tenggara Timur.
- b) Tanah Seluas 8.495 M² bersetifikat berada di Kecamatan Maurole Desa Keliwumbu sebagai lokasi pos pengawasan wilayah utara Kabupaten Ende. merupakan milik propinsi Nusa Tenggara Timur

Rincian Kondisi Aset Dinas Perikanan kabupaten Ende tahun 2022:

Tabel. 2.2.1 Kondisi Aset Dinas Perikanan Kab. Ende

No	Jenis Aset	Vol	Sat.	Kondisi Aset			
				B	RB	RS	RR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cold Stroge 10 Ton	1	Unit		1		
2	Genzet 50 KVA	1	Unit		1		
3	Bengkel Nelayan	1	Unit				1
4	Laboratorium	1	Unit				1
5	Balai Pertemuan Nelayan	1	Unit				1
6	Pabrik Es	2	Unit		1		1
7	Pos Pengawasan	2	Unit				2

8	Rumah Andon	2	Unit	2			
9	Mess TPI	1	Unit	1			
10	Gedung Kantor	1	Unit	1			
11	SPBUN Nelayan	1	Unit	1			
12	Kendaraan Roda 4	2	Unit	2			
13	Kendaraan Roda 2	18	Unit	12	6		
14	Mesin Es Curah	1	Unit	1			
15	Mesin Bor	1	Unit	1			
16	Compresor	1	Unit	1			
17	Alat Selam	3	Unit				3
18	Radio Pantai	1	Unit		1		1

Keterangan

B : Baik

RB : Rusak Berat

RS : Rusak Sedang

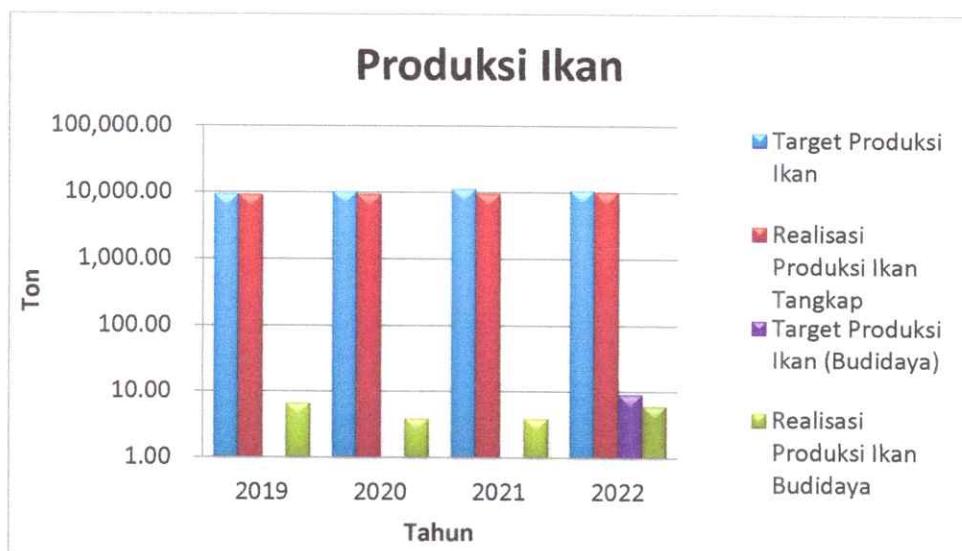
RR : Rusak Ringan

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

Kinerja pelayanan Dinas Perikanan dalam kurun waktu tahun 2019 – 2022 telah berdampak signifikan bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan.

Pelayanan Urusan Kelautan dan Perikanan diarahkan dalam mencapai sasaran meningkatnya produksi perikanan, pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan bagi masyarakat, meningkatnya pembinaan kelompok-kelompok nelayan, pembudidayaan pemasaran hasil perikanan serta kontribusi Dinas Perikanan terhadap PAD.

a. Meningkatnya Produksi Ikan



Gambar 2.3.1 Trend Produksi perikanan 2019-2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa, produksi perikanan terdiri dari produksi ikan tangkap dan produksi ikan budidaya. Tahun 2019 jumlah produksi ikan keseluruhan, yaitu 9290,95 ton atau sebesar 44,86%. Dengan jumlah produksi ikan tangkap 9284,256 Ton dan produksi ikan budidaya 6,694 Ton. Tahun 2020 jumlah produksi ikan mencapai 9.457,771 Ton (45,66%) dari target produksi 10.300 Ton, dengan hasil produksi ikan tangkap yaitu 9453,853 Ton dan hasil produksi ikan budidaya 3,918 Ton. Produksi ikan pada tahun 2021 sebesar 9.551,509 Ton (46,11%) dari target produksi 11.330 Ton. Dimana hasil produksi ikan tangkap sebesar 9547,583 Ton dan hasil produksi ikan budidaya sebesar 3,926 Ton. Dan di tahun 2022 hasil produksi ikan tangkap sebesar 10162,242 Ton dari target produksi 10.816,704 Ton dan hasil produksi ikan budidaya 6,0720 Ton dari target produksi sebesar 9,10 Ton. Produksi ikan mengalami kenaikan tiap tahunnya. Ditahun 2020 produksi ikan mengalami kenaikan sebesar 167 Ton dengan capaian realisasi mencapai 1,8 % dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan jumlah produksi ikan sebanyak 94 Ton dengan realisasi capaian sebesar 1,0 % dari tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan produksi sebesar 617 Ton dari tahun sebelumnya. Tetapi kenaikan tersebut tidak mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan, sehingga realisasi capaian kinerja tidak tercapai tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan, dimana produksi ikan tahun 2020 mengalami penurunan produksi dari target yang ditetapkan diakibatkan adanya pandemic covid-19, sehingga berpengaruh pada produktivitas hasil tangkapan. Sedangkan produksi ikan tahun 2021 tidak mencapai target RPJMD diakibatkan adanya badai seroja yang menyebabkan kerusakan dan hanyutnya kapal/perahu yang terbawa arus.

Tahun 2022 produksi ikan telah mengalami peningkatan produksi yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Dimana para nelayan dan pembudidaya ikan sudah mulai memaksimalkan sarana dan prasana yang ada dalam meningkatkan produksi ikan. Namun, dalam proses tersebut masih memiliki kendala yang dialami, yaitu minimnya kegiatan pelatihan teknis penangkapan dan pembudidayaan ikan yang diberikan kepada masyarakat, SDM Nelayan hanya mampu mengoperasikan sarana penangkapan berukuran kecil dan terbatas. Dalam meningkatkan Produktivitas ikan, maka perlu adanya penambahan jumlah Sarana dan Penangkapan ikan yang didistribusikan kepada kelompok masyarakat Nelayan dan penambahan jumlah bibit ikan, obat-obatan ikan, sarana dan prasarana pembudidayaan ikan yang didistribusikan kepada kelompok masyarakat pembudidaya. Serta pelatihan teknis dalam meningkatkan sumber daya manusia pada kelompok nelayan dan pembudidayaan ikan baik dalam pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana. Sedangkan target produksi ikan tahun 2019 -2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Produksi Ikan				
	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
1	2019	9363,70	9290,95	99,22	Renstra 2019-2024
2	2020	10300	9457,771	91,82	Renstra 2019-2024
3	2021	11330	9551,509	84,30	Renstra 2019-2024
4	2022	10816,704	10162,242	93,95	Perubahan Renstra 2019-2024 (Produksi Ikan Tangkap)
		9,10	5,0470	55,46	Perubahan Renstra 2019-2024 (Produksi Ikan Budidaya)

b. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi Ikan

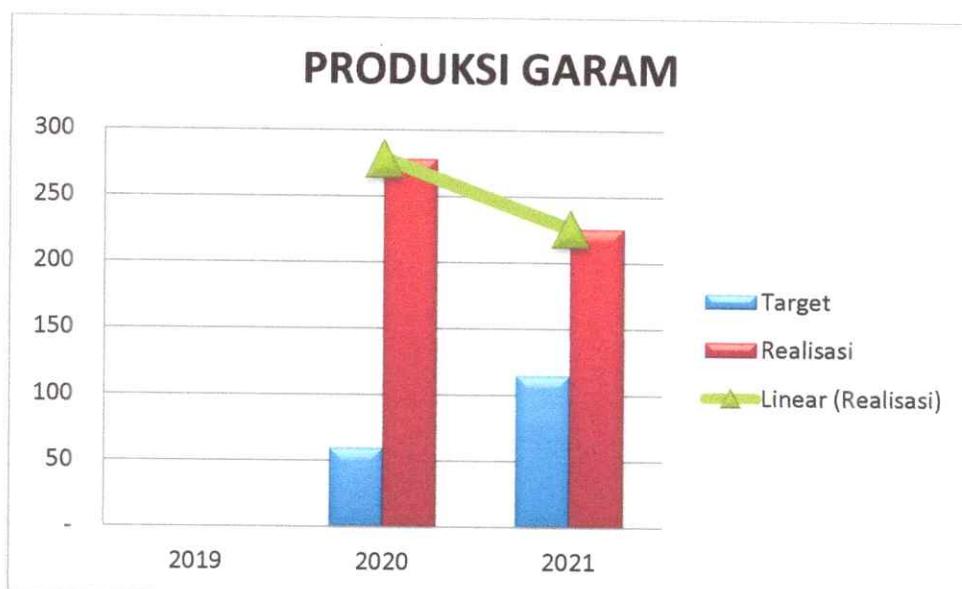


Gambar 2.3.2 Trend Angka Konsumsi Ikan 2019-2021 berdasarkan Renstra 2019-2024

Gambar diatas menunjukan bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2019 sebesar 34,14 Kg/Kapita/Org atau sebesar 97,54% dengan capaian Indikator Kinerja sebesar 104,21% dimana angka realisasi tersebut melebihi Target RPJMD Tahun 2019 yakni sebesar 33,90Kg/Kapita/Org atau sebesar 96,86%. Selanjutnya capaian kinerja Tingkat Konsumsi Ikan masyarakat pada tahun 2020 sebesar 34,44 Kg/Kapita/Org atau sebesar 98,40% dengan capaian Indikator Kinerja sebesar 101% dimana angka realisasi tersebutmelebihi Target RPJMD Tahun 2020 yakni sebesar 34,10Kg/Kapita/Org atau sebesar 97,43%. Pada tahun 2021capaian kinerja sebesar 34,78 Kg/Kapita/Org atau sebesar 99,37% dengan capaian Indikator Kinerja sebesar 101,49% dimana angka realisasi tersebutmelebihi Target RPJMD Tahun 2020 yakni sebesar 34,27 Kg/Kapita/Org atau sebesar 97,91%.Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Ende pada tahun 2019, 2020 dan 2021 terus menerus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah mulai memahami tentang manfaat dan pentingnya mengkonsumsi ikan. Dalam meningkatkan konsumsi ikan perlu tersedianya infrastusktur yang sangat penting dalam menciptakan rantai

pasokan ikan yang efektif dan efisien. Sehingga ketersediaan komoditas ikan yang berkualitas bagi konsumen juga akan lebih terjamin. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi program dan kegiatan yang berkelanjutan guna mencapai target pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan.

c. Meningkatnya Produksi Garam



Gambar 2.3.3Trend Produksi Garam 2019-2021berdasarkan Renstra 2019-2024

Jumlah Produksi Garam Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 111,32 % dengan luas lahan garam sebesar 51,6 Ha dari target RPJMD yang ingin di capai pada tahun 2020 sebesar 24 %, dengan capaian indikatornya sebesar 463,85% sehingga mempengaruhi tingkat capaian indicator yang lebih besar dari target RPJMD untuk tahun 2020 sebesar 24%. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah produksi garam sebesar 225, 73 ton dengan target sebesar 115 ton dan capaian indikator mencapai 196,29 %. Pada tahun 2019 tidak adanya Jumlah produksi garam. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah produksi garam mengalami penurunan sebesar 52, 58 ton atau sebesar 18,9 %. Hal ini dikarenakan tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan pengembangan usaha garam. Selain itu harga jual yang cukup rendah berdampak pada aktifitas pengembangan usaha garam.

d. Cakupan Bina Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan



Gambar 2.3.4 Grafik Trend Cakupan Bina Kelompok berdasarkan Renstra 2019-2024

Gambar diatas menunjukan bahwa capaian kinerja cakupan pembinaan dan pendampingan pada kelompok nelayan, pembudidaya dan poklahsar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Yang mana pembinaan kelompok merupakan total akumulasi dari pembinaan kelompok pada tahun sebelumnya sebanyak 235 kelompok yang sudah dibina. Dimana pada Tahun 2019 telah dilaksanakan pembinaan sebanyak 259 kelompok (24 kelompok binaan yang terdiri dari 24 kelompok nelayan) atau prosentase realisasinya sebesar 110,21% pada dasarnya melebihi target yang di tetapkan pada Tahun 2019 dari Target capaian indikator RPJMD TA. 2019 yang ingin dicapai sebanyak 235 kelompok atau sebesar 100 %. Pada tahun 2020 jumlah kelompok yang telah dilakukan pembinaan sebanyak 278 kelompok (19 kelompok binaan yang terdiri dari 12 kelompok nelayan, 4 kelompok budidaya dan 3 kelompok pengolah/pemasar) atau prosentase realisasinya sebesar 104,91% pada dasarnya melebihi target yang di tetapkan pada Tahun 2020 dari Target capaian indikator RPJMD TA. 2020 yang ingin dicapai sebanyak 265 kelompok atau sebesar 100 %. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah kelompok yang telah dilakukan pembinaan sebanyak 295 kelompok (17 kelompok binaan yang terdiri dari 13 kelompok nelayan dan 4 kelompok budidaya) atau prosentase realisasinya sebesar 100 % pada dasarnya melebihi target yang di tetapkan pada Tahun 2020 dari Target capaian indikator RPJMD TA. 2020 yang ingin dicapai sebanyak 295 kelompok atau sebesar 100 %. Peningkatan prosentase intensitas pembinaan dan pendampingan pada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan, serta peningkatan prosentase cakupan bina kelompok nelayan tiap tahunnya dapat meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan produktivitas hasil perikanan. Sedangkan cakupan bina kelompok tahun 2019 -2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

e. Prosentase Peningkatan Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PAD

Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PAD mengalami penurunan pada Tahun 2020 dan 2021. Dimana penerimaan PAD pada Tahun 2020 hanya sebesar Rp. 42.653.000,- dibandingkan tahun sebelumnya. sedangkan pada tahun 2021 penerimaan PAD sebesar Rp 63.762.004,75 dan tahun 2022 penerimaan PAD sebesar Rp. 110.702.675,14.

Pencapaian kinerja pelayanan keseluruhan program pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Ende dalam mendukung RPJMD 2019-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kab. Ende Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Realisasi Capaian Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Tahun Ke-			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Meningkatnya Produksi Ikan				9.363,70	10.300	11.330		9.290,95	9.458	9.551,509		99,22	91,82	84,30	
	Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap								10816,704				10162,242			93,95
	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya							9,10					6,0720			66,73
2	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi Ikan				32,76	34	34	-	34,14	34	34,78	-	104,21	101	101,49	
3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan				235	265	295	-	259	278	295	-	110,21	104,91	100	
4	Produksi Garam				-	60	115	-	-	278,31	225,73	-	-	463,85	196,29	
5	Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PAD				830.160.000	130.000.000	90.000.000	90.000.000	50.400.000	42.653.000	63.762.004,75	110.702.675,14	6,07	32,81	70,85	123,00

2.3.1. Sumber Pembiayaan

Dalam Kurun Waktu Tahun 2019 – 2022, Dinas Perikanan mendapat Sumber Pembiayaan dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung tugas dan fungsi pokoknya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kab. Ende Tahun 2019-2022

Uraian	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)				Rata-rata pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Total Pendapatan	830,160,000.00	130,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	50,400,000.00	42,653,000.00	63,762,004.75	110,702,675.14	6.07	32.81	70.85	123.00	285,040,000.00	66,879,419.97
Pendapatan Daerah	830,160,000.00	130,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	50,400,000.00	42,653,000.00	63,762,004.75	110,702,675.14	6.07	32.81	70.85	123.00	285,040,000.00	66,879,419.97
Belanja Daerah	11,719,585,362.00	10,395,068,550.00	10,174,982,671.00	9,482,144,315.00	11,318,378,710.00	10,216,134,525.00	9,779,842,438.00	8,713,883,079.00	96.58	98.28	96.12	91.90	10,442,945,224.50	10,007,059,688.00
Belanja Tidak Langsung	2,153,179,362.00	1,788,638,150.00	2,318,638,929.00	-	2,001,641,581.00	1,769,554,412.00	2,239,146,334.00	-	92.96	98.93	96.57	-	1,565,114,110.25	1,502,585,581.75
Belanja Pegawai	2,153,179,362.00	1,788,638,150.00	2,318,638,929.00	-	2,001,641,581.00	1,769,554,412.00	2,239,146,334.00	-	92.96	98.93	96.57	-	1,565,114,110.25	1,502,585,581.75
Belanja Langsung	9,566,406,000.00	8,606,430,400.00	7,856,343,742.00	9,482,144,315.00	9,316,737,129.00	8,446,580,113.00	7,540,696,104.00	8,713,883,079.00	97.39	98.14	95.98	91.90	8,877,831,114.25	8,504,474,106.25
Belanja Pegawai	381,175,000.00	446,750,000.00	-	2,428,934,693.00	372,525,000.00	445,650,000.00	-	2,335,214,958.00	97.73	99.75	-	0.00	814,214,923.25	788,347,489.50
Belanja Barang & Jasa	8,735,876,000.00	7,712,930,400.00	1,609,838,832.00	1,763,804,622.00	8,533,887,129.00	7,555,280,113.00	1,375,326,422.00	1,629,039,121.00	97.69	97.96	85.43	92.36	4,955,612,463.50	4,773,383,196.25
Belanja Hibah	381,175,000.00	446,750,000.00	5,819,900,000.00	5,082,695,000.00	372,525,000.00	445,650,000.00	5,747,541,500.00	4,543,275,000.00	97.73	99.75	98.76	89.39	2,932,630,000.00	2,777,247,875.00
Belanja Modal	68,180,000.00	-	426,604,910.00	206,710,000.00	37,800,000.00	-	417,828,182.00	206,354,000.00	55.44	-	97.94	99.83	175,373,727.50	165,495,545.50
Total	(10,889,425,362.00)	(10,265,068,550.00)	(10,084,982,671.00)	(9,392,144,315.00)	(11,267,978,710.00)	(10,173,481,525.00)	(9,716,080,433.25)	(8,603,180,403.86)	103.48	99.11	96.34	91.60		

Data diatas menunjukan bahwa kebijakan alokasi APBD sangat mendukung pelayanan pada Dinas Perikanan. Alokasi APBD tahun 2019 adalah sebesar Rp. 11.719.585.362,- dan mengalami penurunan sebesar Rp. 10.395.068.550,- pada tahun 2020. Pada tahun 2021 terjadi penurunan alokasi anggaran dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 10.174.982.671,- sedangkan untuk tahun 2022 alokasi anggaran mengalami penurunan sebesar Rp. 9.482.144.315,-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kabupaten Ende merupakan salah satu Kabupaten di wilayah NTT yang memiliki Potensi sumberdaya alam sektor kelautan dan perikanan yang cukup menjanjikan untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini cukup beralasan karena secara geografis Kabupaten Ende berada 2 wilayah perairan laut yaitu wilayah Perairan Utara (Laut Flores) dan Perairan Selatan (Laut Sabu) dengan Panjang Garis Pantai 205.572 Km² . Potensi lestari perikanan (*Maximum Sustainable Yield / MSY*) yang terkandung didalamnya mencapai ± 24.229,4 ton/tahun dan baru dimanfaatkan 10162,242 ton di tahun 2022

Sektor kelautan dan perikanan mampu memberikan kontribusi besar dalam pembangunan daerah. Karakteristik perairan seperti merupakan aset strategis yang dapat didayagunakan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan karakteristik wilayah lingkungan strategis, terdapat sejumlah tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Ende.

Lingkup pengembangan pelayanan telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Ende dengan bidang pelayanan meliputi:

- Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap;
- Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perikanan;
- Bidang Pengembangan Perikanan Budidaya; dan
- Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Kecil Perikanan.

Tantangan dan peluang Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1) Tantangan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan di Kab.Ende.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Ende ialah :

- a. Rendahnya kapasitas SDM Aparatur pada Dinas Perikanan serta SDM Masyarakat Perikanan (Nelayan, Pembudidaya, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan); termasuk kelembagaan kelompok masyarakat perikanan dan IPTEK);

- b. Belum Optimalnya sarana dan Prasarana produksi Perikanan dan pemasaran hasil produk olahan ikan;
 - c. Rendahnya akses masyarakat terhadap sumber permodalan usaha serta pengetahuan tentang manajemen usaha;
 - d. Musim yang tidak menentu/perubahan cuaca yang tidak merata sehingga nelayan kecil dengan armada kecil tidak bisa melaut
 - e. Belum adanya penerapan metode CBIB dan CPIB;
 - f. Belum optimalnya Pelaksanaan dan pengelolaan TPI Paupanda;
 - g. Masih adanya aktivitas ilegal fishing yang menyebabkan kerusakan ekosistem serta berdampak pada penurunan produktivitas hasil Perikanan tangkap dan Budidaya.
- 2) Peluang Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Ende. Peluang yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan pada masa yang akan datang :
- a. Adanya potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Potensi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya) dimiliki yang belum di manfaatkan secara optimalkan ;
 - b. Meningkatnya kebutuhan masyarakat lokal akan konsumsi ikan dan bahan baku ikan untuk produk olahan hasil perikanan;
 - c. Adanya dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan perikanan dan kelautan
 - d. Tingginya keinginan masyarakat dalam usaha budidaya ikan;
 - e. Adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan bidang Perikanan dari Pemerintah Daerah guna mendukung 12 program prioritas pembangunan daerah;
 - f. Adanya dukungan Program dan Kegiatan/anggaran yang bersumber daripemerintah propinsi NTT(APBD I) melalui cabang Dinas Perikanan Prop. NTT wilayah kabupaten Ende, Kabupaten Ngada dan kabupaten Nagekeo;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

DINAS PERIKANAN KABUPATEN ENDE

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Ende

Analisis isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Ende dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Ende berdasarkan Permasalahan Pembangunan Daerah selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir yakni Permasalahan pokok dan Permasalahan terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang akan menjadi dasar penyusunan rencana strategis dinas dalam menentukan target dan capaian kinerja dinas dalam lima tahun mendatang. Berikut ini adalah Identifikasi permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perikanan Kab. Ende sbb :

1. Belum Optimalnya kelembagaan produksi dan pemasaran hasil perikanan;
2. Rendahnya kualitas SDM nelayan dan pembudidaya dalam penguasaan teknologi;
3. Terbatasnya akses nelayan dan pembudidaya terhadap prmodalan;
4. Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal dibandingkan keterediaan potensi lestarinya;
5. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan, seperti armada penangkapan, peralatan tangkap dan cold storage;
6. Masih adanya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan kimia dan lain-lain;
7. Pengembangan usaha budidaya masih bersifat spasial, belum merapkan konsep usaha kawasan sehingga sangat menyulitkan dalam pembinaan dan pengawasan.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu kondisi yang dapat berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang dimasa yang akan datang. Isu Strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Ende sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya produktifitas perikanan tangkap
2. Belum Optimalnya produktifitas perikanan budidaya
3. Belum Optimalnya pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perikanan tangkap dan budidaya
4. Belum optimalnya produktivitas pengolahan hasil perikanan serta legalitas produk hasil perikanan dan masih rendahnya daya saing produk olahan hasil perikanan
5. Masih kurangnya kualitas SDM Aparatur dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi, oleh karena itu perumusannya harus menggambarkan suatu kondisi ideal yang ingin dicapai dari setiap misi yang telah ditetapkan dalam periode Perencanaan Strategis sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik (*Specific*), terstruktur (*Measurable*), dapat dicapai (*Attainable*), realistik dimungkinkan dicapai (*Rational*), dalam kurun waktu tertentu (*Time bound*) sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Ende Tahun 2024– 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Perekonomian Kabupaten Ende	Meningkatnya Birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Perikanan	B	B	B
		Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Meningkatnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Cakupan Nilai Produksi Perikanan (Berat Ikan Hasil Tangkap x Harga Acuan Jual Ikan/ Harga Per Kilo Ikan)	1.543.783 Rp	1.882.643 Rp	2.215.314 Rp
		Prosentase Kepatuhan Terhadap Peraturan di Bidang Perikanan					
		Prosentase Usaha Poklahsar yang Tersertifikasi/Terstandarisasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan					
		Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Prosentase Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	71,43%	85,71%	100%

BAB V **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Ende

Strategi adalah cara mencapai Tujuan dan Sasaran yang dijabarkan kedalam Kebijakan, Program, Kegiatan. Cara atau langkah yang dirumuskan menggambarkan keterkaitan antara Kebijakan, Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan agar Tujuan dan Sasaran dapat dicapai, sedangkan Untuk menjamin Strategi terlaksana dengan baik dalam mencapai Sasaran Kinerja, maka perlu diformulasikan Kebijakan Operasional sebagai Pedoman atau Acuan dalam menjabarkan Strategi kedalam Program dan Kegiatan.

Rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Dinas Perikanan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Ende.

VISI Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun Dari Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan			
Misi : Percepatan Pembangunan Perekonomian Dan Pariwisata Yang Kompetitif Dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Perekonomian Kabupaten Ende	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja; 2. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat; 3. Meningkatnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	1) Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas SDM serta Kelembagaan Kelompok Masyarakat Perikanan yang Inovatif, Kreatif, mandiri, Partisipatif, Dinamis dan Berdaya Saing; 2) Optimalisasi dan pengembangan sarana dan Prasarana Perikanan guna peningkatan Produksi Perikanan dan kualitas Produksi panen dan pasca panen sebagai Nilai Tambah Hasil Perikanan, dan Penyediaan Pangan berkualitas Bagi Masyarakat; 3) Meningkatkan kualitas SDM Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal	1. Revitalisasi Kelembagaan dan Pengembangan SDM Kelompok Nelayan Kecil, Pembudidaya kecil serta Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan serta kelompok petambak garam; 2. Program dan kegiatan serta alokasi anggaran yang mendukung pola Pemberdayaan Masyarakat sehingga terbentuk Kelembagaan Kelompok yang mandiri, partisipatif dan berdaya saing; 3. Meningkatkan Intensitas Pendampingan dan pembinaan/ penyuluhan pada kelompok nelayan, pembididaya dan polthasar serta kelompok petambak garam; 4. Menetapkan program kegiatan untuk Peningkatan pelatihan, kursus, magang dan bimtek pada kelompok nelayan, pembudidaya dan polthasar guna menciptakan SDM kelompok kreatif, inovatif dan berdaya saing; 5. Intervensi program kegiatan untuk melakukan pendataan pada kelompok nelayan, pembudidaya dan polthasar serta kelompok petambak garam guna menciptakan perikanan one data; 6. Optimalisasi dan Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap; 7. Optimalisasi dan Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan; 8. Optimalisasi dan pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasar hasil perikanan;

		<p>9. Optimalisasi dan Pengembangan sarana dan prasarana petambak garam;</p> <p>10. Pemenuhan Ketercukupan konsumsi ikan yang Aman dan Gizi Masyarakat melalui sosialisasi gemar makan dan lomba masak serba ikan serta melakukan evaluasi terhadap kualitas mutu perikanan;</p> <p>11. Mengoptimalkan Potensi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan wisata bahari;</p> <p>12. Intervensi Program kegiatan untuk membangun dan menciptakan akses permodalan dari Lembaga Keuangan (<i>Bank, Koperasi</i>) yang berpihak pada masyarakat;</p> <p>13. Intervensi program kegiatan untuk melakukan Sosialisasi tentang Undang-undang bidang Kelautan Perikanan di tingkat Desa di wilayah pesisir dengan melibatkan Kelompok Nelayan Kecil, Pelaku usaha, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Aparat Penegak Hukum serta pelaku kepentingan lainnyasertaMelakukan koordinasi dan kerja sama antara intansi terkait pelaksanaan patroli pengawasan terhadap aktivitas Ilegal Fishing yang merusak ekosistem laut yang berimplikasi pada produksi;</p> <p>14. Menetapkan program dan kegiatan serta alokasi anggaran yang memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti Pendidikan Formal Diploma, S1 dan S2, Pendidikan dan BIMTEK, Pelatihan Teknis dan Fungsional;</p>
--	--	---

BAB VI **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

6.1 Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2024 – 2026

Sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan yang diambil, maka ditetapkan 5 Program 18 Kegiatan dan 66 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 - 2026 yaitu :

- a) **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA :**
- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:**
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:**
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD
 - 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :**
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
 - 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b) PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP :

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah sungai, Waduk, Rawa, dan Genangan air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Data dan Informasi sumber Daya Ikan
- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
- Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
- Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

c) PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA :

1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja AsingPenyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

2. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

- Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
- Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
- Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

3. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah

- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/KotaPelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
- Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

4. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

- Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
- Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
- Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

d) PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN :

1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota

e) PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN :

1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

- Pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko

3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

- Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
- Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 6.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan :

Tabel Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) , KEGIATAN (Output), SUB KEGIATAN (Output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL RENCANA (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target

Meningkatnya Kualitas Perekonomian Kabupaten Ende	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Perikanan	3 25 01	PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100%	-	100%	4,500,000,000	100%	4,876,799,270	100%	5,029,385,889	100%	14,406,185,159
			3 25 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	-	100%	300,000,000	100%	350,000,000	100%	370,000,000	100%	1,020,000,000
			3 25 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	-	2 Dokumen	135,000,000	3 Dokumen	145,000,000	2 Dokumen	135,000,000	7 Dokumen	415,000,000
			3 01 01 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	35,000,000	3 Dokumen	90,000,000
			3 01 01 2 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,000,000	3 Dokumen	100,000,000
			3 01 01 2 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	40,000,000	3 Dokumen	90,000,000
			3 01 01 2 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,000,000	3 Dokumen	100,000,000
			3 01 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	-	3 Laporan	30,000,000	3 Laporan	40,000,000	3 Laporan	45,000,000	9 Laporan	115,000,000
			3 01 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	-	3 Laporan	30,000,000	3 Laporan	35,000,000	3 Laporan	45,000,000	9 Laporan	110,000,000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output), SUB KEGIATAN (Output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL RENCANA (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target

Meningkatnya Kualitas Perekonomian Kabupaten Ende	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Perikanan	3 25 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	-	100%	2,214,125,000	100%	2,240,924,270	100%	2,253,510,889	100%	6,708,560,159
			3 25 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Org/Bulan	-	35 Org/Bulan	2,086,323,260	35 Org/Bulan	2,093,122,530	35 Org/Bulan	2,115,125,000	105 Org/Bulan	6,294,570,790
			3 25 01 2 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	-	12 Dokumen	55,000,000	12 Dokumen	57,000,000	12 Dokumen	53,000,000	36 Dokumen	165,000,000
			3 25 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	40,000,000	1 Laporan	35,385,889	3 Laporan	110,385,889
			3 25 01 2 01 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	-	18 Laporan	37,801,740	18 Laporan	50,801,740	18 Laporan	50,000,000	54 Laporan	138,603,480
			3 25 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	-	100%	315,375,000	100%	365,375,000	100%	385,375,000	100%	1,066,125,000
			3 25 01 2 03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	-	1 Dokumen	160,000,000	1 Dokumen	164,000,000	1 Dokumen	162,000,000	3 Dokumen	486,000,000
			3 25 01 2 03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	-	1 Dokumen	121,000,000	1 Dokumen	130,000,000	1 Dokumen	150,000,000	3 Dokumen	401,000,000
			3 25 01 2 03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	-	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	25,375,000	3 Laporan	55,375,000
			3 25 01 2 03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	-	1 Laporan	7,000,000	1 Laporan	12,375,000	1 Laporan	15,000,000	3 Laporan	34,375,000
			3 25 01 2 03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	-	7 Laporan	6,375,000	7 Laporan	10,000,000	7 Laporan	9,000,000	21 Laporan	25,375,000
			3 25 01 2 03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	-	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	16,000,000	1 Laporan	10,000,000	3 Laporan	31,000,000
			3 25 01 2 03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	-	1 Laporan	6,000,000	1 Laporan	13,000,000	1 Laporan	14,000,000	3 Laporan	33,000,000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output), SUB KEGIATAN (Output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL RENCANA (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
									Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target

Meningkatnya Kualitas Perekonomian Kabupaten Ende	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Perikanan	3 25 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		-	100%	165,375,000	100%	215,375,000	100%	235,375,000	100%	616,125,000
			3 25 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		-	1 Paket	165,375,000	1 Paket	215,375,000	1 Paket	235,375,000	3 Paket	616,125,000
			3 25 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		-	100%	258,250,000	100%	308,250,000	100%	328,250,000	100%	894,750,000
			3 25 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		-	1 Paket	10,000,000	1 Paket	15,000,000	1 Paket	15,000,000	3 Paket	40,000,000
			3 25 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		-	1 Paket	7,000,000	1 Paket	8,250,000	1 Paket	10,250,000	3 Paket	25,500,000
			3 25 01 2 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		-	1 Paket	7,000,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	13,000,000	3 Paket	30,000,000
			3 25 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		-	1 Paket	6,250,000	1 Paket	15,000,000	1 Paket	20,000,000	3 Paket	41,250,000
			3 25 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		-	1 Paket	7,000,000	1 Paket	20,000,000	1 Paket	20,000,000	3 Paket	47,000,000
			3 25 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		-	1 Dokumen	7,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	20,000,000	3 Dokumen	37,000,000
			3 25 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		-	1 Laporan	214,000,000	1 Laporan	230,000,000	1 Laporan	230,000,000	3 Laporan	674,000,000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output), SUB KEGIATAN (Output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL RENCANA (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target

Meningkatnya Kualitas Perekonomian Kabupaten Ende	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Perikanan	3 25 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%		-	100%	480,750,000	100%	530,750,000	100%	550,750,000	100%	1,562,250,000
			3 25 01 2 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		-	1 Unit	45,750,000	2 Unit	90,000,000	3 Unit	100,000,000	6 Unit	235,750,000
			3 25 01 2 07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket		-	5 Paket	65,000,000	5 Paket	70,000,000	5 Paket	80,000,000	15 Paket	215,000,000
			3 25 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		-	4 Unit	150,000,000	4 Unit	170,000,000	4 Unit	150,000,000	12 Unit	470,000,000
			3 25 01 2 07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit		-	2 Unit	70,000,000	2 Unit	20,750,000	2 Unit	55,750,000	6 Unit	146,500,000
			3 25 01 2 07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		-	1 Unit	150,000,000	1 Unit	180,000,000	1 Unit	165,000,000	3 Unit	495,000,000
			3 25 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		-	100%	340,500,000	100%	390,500,000	100%	410,500,000	100%	1,141,500,000
			3 25 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		-	1 Laporan	35,500,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	64,500,000	3 Laporan	150,000,000
			3 25 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		-	3 Laporan	120,000,000	3 Laporan	140,000,000	3 Laporan	145,000,000	9 Laporan	405,000,000
			3 25 01 2 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan		-	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	55,500,000	1 Laporan	50,500,000	3 Laporan	156,000,000
			3 25 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		-	1 Laporan	135,000,000	1 Laporan	145,000,000	1 Laporan	150,500,000	3 Laporan	430,500,000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) , KEGIATAN (Output), SUB KEGIATAN (Output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL RENCANA (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target

Meningkatnya Kualitas Perekonomian Kabupaten Ende	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Perikanan	3 25 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	-	100%	425,625,000	100%	475,625,000	100%	495,625,000	100%	1,396,875,000
			3 25 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	-	1 Unit	60,000,000	1 Unit	60,000,000	1 Unit	65,000,000	3 Unit	185,000,000
			3 25 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	-	16 Unit	45,625,000	16 Unit	65,000,000	16 Unit	70,000,000	48 Unit	180,625,000
			3 25 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	-	2 Unit	50,000,000	2 Unit	60,625,000	2 Unit	55,625,000	6 Unit	166,250,000
			3 25 01 2 09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	-	5 Unit	60,000,000	5 Unit	70,000,000	5 Unit	75,000,000	15 Unit	205,000,000
			3 25 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	1 Unit	210,000,000	1 Unit	220,000,000	1 Unit	230,000,000	3 Unit	660,000,000
			JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-	4,500,000,000		4,876,799,270		5,029,385,889		14,406,185,159

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output), SUB KEGIATAN (Output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL RENCANA (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target

Meningkatnya Kualitas Perekonomian Kabupaten Ende	Meningkatnya Kemiskinan Masyarakat	Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap	3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap	52.66%	-	66.58%	2,320,872,693	69.91%	3,000,000,000	72.41%	3,010,000,000	72.41%	8,330,872,693
			3 25 03 2 01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Kelompok Nelayan Yang Terjamin dan terpenuhi kebutuhan sarana usaha perikanan tangkap	56.74%	-	72.40%	2,181,150,000	86.36%	2,700,000,000	100%	2,707,000,000	100%	7,588,150,000
			3 25 03 2 01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	-	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	165,000,000	1 Dokumen	165,000,000	3 Dokumen	480,000,000
			2 05 03 2 01 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	476 Unit	-	150 Unit	1,736,150,000	200 Unit	2,194,500,000	150 Unit	2,200,500,000	500 Unit	6,131,150,000
			3 01 03 2 01 03	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	-	-	5 Unit	295,000,000	5 Unit	340,500,000	5 Unit	341,500,000	15 Unit	977,000,000
			3 25 03 2 02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	60.00%	-	70.00%	139,722,693	86.00%	300,000,000	100%	303,000,000	100%	742,722,693
			3 25 03 2 02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	20 Orang	-	20 Orang	46,574,231	40 Orang	100,000,000	40 Orang	101,000,000	100 Orang	247,574,231
			3 25 03 2 02 02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	5 Kelompok	-	5 Kelompok	46,574,231	10 Kelompok	100,000,000	10 Kelompok	101,000,000	25 Kelompok	247,574,231
			3 25 03 2 02 03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	5 Unit Usaha	-	5 Unit Usaha	46,574,231	10 Unit Usaha	100,000,000	10 Unit Usaha	101,000,000	25 Unit Usaha	247,574,231
			JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					-	2,320,872,693	-	3,000,000,000	-	3,010,000,000	-	8,330,872,693

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output), SUB KEGIATAN (Output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL RENCANA (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target

Meningkatnya Kualitas Perekonomian Kabupaten Ende	Meningkatnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	49.17%	-	80,97%	350,000,000	90,68%	500,000,000	100,00%	510,000,000	100,00%	1,360,000,000
			3 25 04 2 01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase surat izin usaha bidang pembudidayaan ikan yang diterbitkan	-	-	33,33%	32,000,000	66,67%	50,000,000	100%	52,000,000	100%	134,000,000
			3 25 04 2 01 01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	-	-	1 Rekomendasi	16,000,000	1 Rekomendasi	25,000,000	1 Rekomendasi	26,000,000	3 Rekomendasi	67,000,000
			3 25 04 2 01 02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	-	-	1 Rekomendasi	16,000,000	1 Rekomendasi	25,000,000	1 Rekomendasi	26,000,000	3 Rekomendasi	67,000,000
			3 25 04 2 02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Catatan Bina Kelompok Budidaya	51,70%	-	67,35%	82,687,500	82,99%	140,000,000	100%	141,000,000	100%	363,687,500
			3 25 04 2 02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	-	2 Kelompok	20,671,875	2 Kelompok	35,000,000	2 Kelompok	35,250,000	6 Kelompok	90,921,875
			3 25 04 2 02 02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5 Kelompok	-	5 Kelompok	20,671,875	5 Kelompok	35,000,000	5 Kelompok	35,250,000	15 Kelompok	90,921,875

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output), SUB KEGIATAN (Output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL RENCANA (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target

Meningkatnya Kualitas Perekonomian Kabupaten Ende	Meningkatnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3 25 04 2 02 03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	2 Kelompok		-	2 Kelompok	20,671,875	2 Kelompok	35,000,000	2 Kelompok	35,250,000	6 Kelompok	90,921,875
			3 25 04 2 02 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok		-	5 Kelompok	20,671,875	5 Kelompok	35,000,000	5 Kelompok	35,250,000	15 Kelompok	90,921,875
			3 25 04 2 03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase surat TDPIK bidang pembudidaya ikan yang diterbitkan	0.00%		-	33.33%	37,500,000	66.67%	60,000,000	100%	62,000,000	100%	159,500,000
			3 25 04 2 03 01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	-		-	2 Rekomendasi	18,750,000	2 Rekomendasi	30,000,000	2 Rekomendasi	31,000,000	6 Rekomendasi	79,750,000
			3 25 04 2 03 02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	2 Rekomendasi	18,750,000	2 Rekomendasi	30,000,000	2 Rekomendasi	31,000,000	6 Rekomendasi	79,750,000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output), SUB KEGIATAN (Output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL RENCANA (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target

Meningkatnya Kualitas Perekonomian Kabupaten Ende	Meningkatnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3 25 04 2 04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Prosentase Kelompok Pembudidaya Yang Terjamin dan terpenuhi kibutuhan sarana usaha perikanan budidaya	60.00%		-	73.33%	197,812,500	86.67%	250,000,000	100%	255,000,000	100%	702,812,500
			3 25 04 2 04 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	19,000,000	1 Dokumen	27,000,000	1 Dokumen	28,000,000	3 Dokumen	74,000,000
			3 25 04 2 04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Unit	52,312,500	1 Unit	62,312,000	1 Unit	62,312,000	3 Unit	176,936,500
			3 25 04 2 04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	5 Unit	75,000,000	5 Unit	81,668,000	5 Unit	81,668,000	15 Unit	238,336,000
			3 25 04 2 04 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	-		-	1 Dokumen	23,000,000	1 Dokumen	31,020,000	1 Dokumen	32,020,000	3 Dokumen	86,040,000
			3 25 04 2 04 05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	-		-	10 Orang	9,500,000	20 Orang	16,000,000	20 Orang	17,000,000	50 Orang	42,500,000
			3 25 04 2 04 06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	-		-	2 Ha	9,500,000	2 Ha	16,000,000	2 Ha	17,000,000	6 Ha	42,500,000
			3 25 04 2 04 07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	-		-	10 Orang	9,500,000	20 Orang	16,000,000	20 Orang	17,000,000	50 Orang	42,500,000
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						-		-	350,000,000	80.97%	500,000,000	90.68%	510,000,000	100%	1,360,000,000	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output), SUB KEGITAN (Output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL RENCANA (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya Kualitas Perekonomian Kabupaten Ende	Meningkatnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Prosentase Kepatuhan Terhadap Peraturan di Bidang Perikanan	3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Prosentase Kepatuhan Terhadap Peraturan di Bidang Perikanan	0.00%	-	20.00%	150,000,000	43.00%	200,000,000	100.00%	210,000,000	100.00%	560,000,000
			3 25 05 2 01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dilakukan Dalam Kabupaten/Kota	Prosentase Masyarakat Pengawas perikanan yang dibina	22.22%	-	50.00%	150,000,000	72.22%	200,000,000	100.00%	210,000,000	100.00%	560,000,000
			3 25 05 2 01 0007	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	-	-	10 Pelaku Usaha	150,000,000	10 Pelaku Usaha	200,000,000	10 Pelaku Usaha	210,000,000	30 Pelaku Usaha	560,000,000
			JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						-	150,000,000	-	200,000,000	-	210,000,000	181,843,750

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output), SUB KEGIATAN (Output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL RENCANA (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target

Meningkatnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Prosentase Usaha Poklahsar yang tersertifikasi/terstandarisasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	<p>3 25 06</p> <p>3 25 06 2 01</p> <p>3 25 05 2 01 01</p> <p>3 25 06 2 02</p> <p>3 25 06 2 02 0002</p>	<p>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</p> <p>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</p> <p>Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</p> <p>Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko</p>	<p>Prosentase Usaha Poklahsar yang terstandarisasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</p> <p>Prosentase Poklahsar yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</p> <p>Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko</p> <p>Prosentase unit usaha hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan</p> <p>Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko</p>	<p>29.70%</p> <p>28.00%</p> <p>-</p> <p>46.67%</p> <p>10 Unit Usaha</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	49.50%	550,000,000	69.31%	750,000,000	89.11%	760,000,000	89.11%	2,060,000,000	
							68.00%	80,000,000	84.00%	100,000,000	100.00%	105,000,000	100.00%	285,000,000	
							-	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	105,000,000	3 Dokumen	285,000,000
							60.00%	60,000,000	73.33%	80,000,000	100.00%	82,000,000	100.00%	222,000,000	
							10 Unit Usaha	60,000,000	10 Unit Usaha	80,000,000	10 Unit Usaha	82,000,000	30 Unit Usaha	222,000,000	
							-	10 Unit Usaha	60,000,000	10 Unit Usaha	80,000,000	10 Unit Usaha	82,000,000	30 Unit Usaha	222,000,000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) , KEGIATAN (Output), SUB KEGIATAN (Output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL RENCANA (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya Kualitas Perekonomian Kabupaten Ende	Meningkatnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Prosentase Usaha Poklahsar yang terstandarisasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	3 25 06 2 03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase kelompok poklahsar yang terfasilitasi sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan	40.00%	-	66.67%	410,000,000	83.33%	570,000,000	100.00%	573,000,000	100.00%	1,553,000,000
			3 25 05 2 03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10162,242Ton	-	12850,328 Ton	220,000,000	13492,84 Ton	300,000,000	13974,70 Ton	301,000,000	40317,868 Ton	821,000,000
			3 25 05 2 03 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfertilasi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfertilasi	20 Pelaku Usaha	-	20 Pelaku Usaha	190,000,000	20 Pelaku Usaha	270,000,000	20 Pelaku Usaha	272,000,000	60 Pelaku Usaha	732,000,000
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							-		550,000,000		750,000,000		760,000,000		2,060,000,000
JUMLAH TOTAL PENDANAAN RENSTRA TAHUN 2024 - 2026							-		7,870,872,693		9,326,799,270		9,519,385,889		26,717,057,852

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Ende yang secara langsung menunjukkan target kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD secara terperinci disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan Dan Perikanan
Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Ende 2024 - 2026

TUJUAN	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SAT	TAHUN DASAR (2022)		TARGET CAPIAAN KINERJA TAHUNAN							
						FORMULA	K	2024	K	2025	K	2026	K		
						7	8	9	10	11	12	13	14		
Meningkatnya Kualitas Perekonomian Kabupaten Ende	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan _____ x 100 Jumlah Total Kegiatan dikali 100%	%			100%		100%		100%		100%	
		1	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Total Produksi Perikanan Budidaya Tahun n (Ton) _____ x 100% Target Produksi Budidaya (Ton)	%	6.0720 12.35	49.17%	10 12.35	80.97%	11.2 12.35	90.68%	12.35 12.35	100.00%		
		2	Prosentase Kepatuhan Terhadap Peraturan di Bidang Perikanan	Jumlah Kegiatan dan Usaha yang mematuhi Regulasi/Peraturan di bidang Perikanan pada Tahun n _____ x 100% Jumlah Total Kegiatan dan Usaha yang mematuhi Regulasi/Peraturan di bidang Perikanan	%	0	%	40 200	20.00%	86 200	43.00%	200 200	100.00%		
		3	Prosentase Usaha Poklahsar yang terstandarisasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah usaha poklahsar yang terstandarisasi mutu dan keamanan hasil perikanan pada Tahun n _____ x 100% Jumlah Total Target Usaha Poklahsar Yang Terstandarisasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	%	30 101	29.70%	50 101	49.50%	70 101	69.31%	90 101	89.11%		
	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	1	Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton) _____ x 100% Potensi Lestari Perikanan Tangkap (Ton)	%	10,162.242 19,299.4	52.66%	12,850.328 19,299.4	66.58%	13,492.84 19,299.4	69.91%	13,974.70 19,299.4	72.41%		

TABEL RENCANA STRATEGIS
DINAS PERIKANAN KABUPATEN ENDE
TAHUN 2024-2026

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	NO	INDIKATOR SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN				URUSAN	
						KEBIJAKAN		PROGRAM (PERMENDAGRI 2019)			
						NO	URAIAN	NO	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatnya Kualitas Perekonomian Kabupaten Ende	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1	Nilai AKIP Dinas Perikanan	1	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kelautan dan Perikanan (Dinas Perikanan)	
		2	Meningkatnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	1	Cakupan Nilai Produksi Perikanan (Berat Ikan Hasil Tangkap x Harga Acuan Jual Ikan/ Harga Per Kilo Ikan)	1	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas SDM serta Kelembagaan Kelompok Masyarakat Perikanan yang Inovatif, Kreatif, mandiri, Partisipatif, Dinamis dan Berdaya Saing; dan Optimalisasi dan pengembangan sarana dan Prasarana Perikanan guna peningkatan Produksi Perikanan dan kualitas Produksi panen dan pasca panen sebagai Nilai Tambah Hasil Perikanan, dan Penyediaan Pangan berkualitas Bagi Masyarakat	1	Program Pengelolaan Perikanan Budaya		
		3	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	1	Prosentase Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		
								1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 adalah 2 (dua) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2025-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perikanan Tahun 2025, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Ende Tahun 2005-2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten Ende agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten Ende dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Ende yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

